

PPTRA BIG Serahkan Hasil Kegiatan Pemetaan Integrasi Neraca Sumberdaya Alam untuk Dukungan Penyusunan KLHS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah



Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dokumen KLHS RPJMD melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada penyusunan dokumen KLHS diharapkan daerah mampu menjelaskan mengenai kondisi lingkungannya.

Pada tahun 2019, BIG telah melaksanakan kegiatan pemetaan Integrasi Neraca Sumberdaya Alam untuk Dukungan Penyusunan KLHS Kabupaten/Kota. Kegiatan ini mencakup empat komponen sumberdaya alam yaitu lahan, air, hutan serta mineral dan batu bara yang kemudian akan diintegrasikan dan dilihat bagaimana status sumberdaya alamnya baik dari saldo (cadangan) dan pemanfaatannya. Kegiatan ini dilakukan di 10 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan (Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep (Provinsi Jawa Timur), dan Kabupaten Gianyar dan Klungkung (Provinsi Bali). Sepuluh provinsi tersebut dipilih karena telah menjalani Pilkada di tahun 2018 dan harus menyelesaikan penyusunan KLHS RPJMD di tahun 2019.

Pada tanggal 17 dan 18 Desember 2019, Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya (PDS) melaksanakan penyerahan hasil di Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, terkait kegiatan pemetaan Integrasi Neraca

Sumberdaya Alam untuk dukungan Penyusunan KLHS Kabupaten/Kota. Hasil yang diberikan berupa data base spasial, buku populer serta album peta dalam bentuk soft copy. Penyerahan hasil dilakukan kepada BAPPEDA di masing-masing kabupaten tersebut. Di BAPPEDA Kabupaten Purbalingga penyerahan hasil dilakukan kepada Kepala BAPPEDA Siswanto dan Nugroho P Pratomo selaku Kepala Bidang Prasarana dan Fisik. Kemudian BAPPEDA Kabupaten Banjarnegara diserahkan kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Eryanto Arif. Selanjutnya, BAPPEDA Kabupaten Batang penyerahan hasil diwakili oleh Pramudito, serta penyerahan hasil di Kabupaten Pekalongan diserahkan kepada Nugara.

BIG berharap dari penyerahan hasil kegiatan penyusunan integrasi neraca sumberdaya alam yang telah disusun BIG dapat digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen KLHS RPJMD masing-masing Kabupaten/Kota tersebut. Selain itu BIG juga memberikan soft file database spatial terkait pemetaan integrasi neraca sehingga pemerintah daerah dapat juga menggunakan data tersebut. [Dinar Farahiyah Rahmah, 2019]

Klinik Asistensi Percepatan Peta RDTR OSS di BIG



Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 di Auditorium BIG telah dilakukan klinik asistensi percepatan dalam rangka penyelesaian Peta RDTR untuk Online Single Submission (OSS). Asistensi ini merupakan asistensi tahap akhir untuk memverifikasi peta tematik dan peta rencana, sebelum masuk pada Rapat Pleno Perpetaan di BIG. Rapat Pleno tersebut merupakan tahapan akhir proses asistensi di BIG, dimana pada rapat pleno tersebut juga akan diserahkan Surat Rekomendasi Perpetaan yang menyatakan bahwa peta rencana tata ruang terkait sudah memenuhi kaidah teknis perpetaan.

Asistensi ini diikuti oleh 23 RDTR OSS, yang berasal dari Direktorat Pemanfaatan dan Direktorat Penataan Kawasan yang berada di Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Pada minggu sebelumnya, di tempat yang sama juga telah dilaksanakan asistensi tahap akhir untuk 34 RDTR OSS yang berasal dari Direktorat Perencanaan dan Direktorat Pembinaan, Kementerian ATR/BPN. Jumlah keseluruhan RDTR OSS yang harus diselesaikan di tahun 2019 ini adalah 57 RDTR. Acara ini dibuka oleh Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang BIG beserta Kasubdit Perencanaan dan Kemitraan, Direktorat Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN, Ibu Sri Damar Agustina. Hasil dari kegiatan ini dinyatakan sebanyak 20 Peta RDTR OSS siap dibahas di Rapat Pleno awal Januari 2020 mendatang. Minggu sebelumnya sudah dinyatakan 21 RDTR yang juga siap dibahas di Pleno, sehingga pada Rapat Pleno tahap pertama sudah 41 Peta RDTR yang siap dibahas dan selesai dari 57 RDTR. Diharapkan penyelesaian Peta RDTR OSS yang tersisa dapat segera selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga target perijinan berbasis OSS ini dapat segera diimplemetasikan. [Ryan Priyadi, 2019]

Tabel Jumlah Rekomendasi Peta RTR Periode Januari - Desember 2019

125 Rekomendasi

Nama Provinsi	RDTR	RTRW Kab/Kota	RTRW Prov	KSP	Total
Bali	2	5	0	0	7
Aceh	1	0	0	0	1
Jambi	1	4	0	0	5
Jawa Timur	8	13	0	0	21
Jawa Tengah	3	14	0	0	17
Jawa Barat	2	7	0	0	9
Banten	0	3	0	2	5
DIY	1	2	0	0	3
Sumatera Barat	1	5	0	0	6
Kalimantan Tengah	0	6	0	0	6
Kalimantan Barat	4	0	0	0	4
Kalimantan Selatan	1	1	0	0	2
Riau	0	2	0	0	2
Kepulauan Riau	0	2	0	0	2
Sumatera Selatan	0	2	0	0	2
Sumatera Utara	0	2	0	0	2
Lampung	0	6	0	0	6
NTB	4	1	0	0	5
NTT	1	0	1	0	2
Maluku	4	1	0	0	5
Gorontalo	0	1	0	0	1
Sulawesi Barat	1	0	0	0	1
Sulawesi Tenggara	0	3	0	0	3
Sulawesi Utara	0	4	0	0	4
Papua	2	2	0	0	4
Jumlah	36	86	1	2	125

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.pttra@gmail.com
Twitter : @pptra_big
Instagram : @pptra_big
http://big.go.id/newsletter/



TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA, DAN ATLAS

Catatan Beranda

Inshaallah kita akan sama-sama menyaksikan berakhirnya tahun 2019, tahun yang awalnya dipuja, dirayakan dan diharapkan sebagai tahun baru di bulan Januari lalu pada akhirnya juga berlalu. Berbagai kenangan dan perbuatan yang tercipta di tahun 2019 akan terkubur dengan sendirinya, dan menjadi catatan kebaikan atau keburukan sekaligus modal kehidupan di tahun berikutnya. Subhanallah, itulah ungkapan yang bisa mewakili perasaan saat menjalankan berbagai kesibukan di bulan Desember dan menunggu kedatangan tahun baru 2020. Bulan Desember adalah bulan akhir dari semua kegiatan, meskipun jumlah hari kerja tetap 30 (tiga puluh) namun efektif kerja paling hanya 10 harian. Selain kejar-kejaran menyelesaikan pekerjaan teknis seperti mengerjakan pleno tata ruang, asistensi intensif, deseminasi dan survei akhir ada pula pekerjaan administratif yang harus selesai dengan dead line, seperti mengajukan rencana kegiatan harian, pengajuan anggaran detail LS, menghitung GU Nihil, menyiapkan garansi bank serta membuat

BAPP dan BAST. Sementara hari kerja terbatas dan tidak ada toleransi untuk setiap kesalahan.

Kesibukan paling padat adalah persiapan Garansi Bank (BG) beberapa pekerjaan kontrak yang berakhir di atas tanggal 20 Desember. Persiapan BG cukup menguras waktu dan tenaga, bukannya sulit tetapi karena jadwal ketat telah disusun oleh KPPN dan tiada dispensasi bagi kesalahan dalam menyiapkan BG ke KPPN. Ketelitian dalam menyusun dokumen BG sangat dibutuhkan sehingga tidak ada kesalahan yang ditemukan. Terkadang kesalahan yang ditemukan tidak substansif tetapi hal sepele. Kita bersama pasti sepakat untuk berbenah agar kejadian rush hour, hectic work, tidur diteras kantor disetiap akhir bulan Desember tidak terulang tiap tahun. Membenahi sistem akhir tahun merupakan solusi yang harus terus menerus ditingkatkan. Saran kami yaitu: pertama, KPPN mesti lebih toleran bila kesalahan sedikit dan prinsip jangan ditolak tapi tetap diterima karena pihak bank juga sudah mengeluarkan BG dan sudah ada garansi dari pihak bank jadi sebetulnya aman. Kedua, menggunakan e-gov, paper less dan penilaian mandiri sehingga kami tidak harus berbondong-bondong ke kantor KPPN untuk waktu bersamaan hanya untuk serahkan dokumen

pertanggungjawaban di akhir tahun. Ketiga, akhir anggaran sebaiknya jangan berakhir Desember, karena bulan Desember banyak hari libur, sebaiknya geser ke bulan April setiap tahun. Ke empat untuk kantor pemerintah sebaiknya mengintensifkan cek kesehatan rutin untuk anggota atau administrasi keproyekan sehingga potensi penyakit bisa dideteksi lebih dini.

Serangkaian kegiatan tersebut walau kami merasa sudah kerja maksimal, tetap penyerapan di PPTRA masih di bawah 90% tepatnya sekitar 89% atau lebih rendah 2% dari yang ditargetkan. Tentu ada rasa sedikit kecewa, namun begitulah realita. Sisa kontrak saja sekitar 8% tidak dapat digunakan, karena terkategori kegiatan PN dan pemanfaatan sisa kontrak kegiatan PN harus untuk mendukung kegiatan PN baik tambah ooutput ataupun tambah lokasi. Persyaratan seperti ini yang terkadang menyulitkan implementasinya karena masalah waktu. Menyongsong tahun 2020, kami berharap PPTRA bisa berkontribusi lebih baik lagi dalam program penyelenggaraan informasi geospasial, walau harus menggunakan baju baru. Bismillah sebentar lagi tahun baru 2020 meski kami tidak menyambut, kamu pasti datang dan dengan berjalannya waktu kamu pun pasti berlalu. [Mulyanto Darmawan, 2019]

Nilai Penting koordinasi antar K/L dalam menyusun Neraca Sumberdaya Alam

Kebijakan & Isu Strategis

Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Badan Informasi Geospasial dalam melakukan pemetaan neraca sumberdaya alam (NSDA) selama ini telah bekerjasama dengan 4 (empat) Kementerian dan Lembaga, khususnya dalam membuat Standar Nasional Indonesia (SNI) NSDA. SNI ini berisi tentang standar pemetaan Neraca Sumberdaya Alam 4 komponen, yaitu Neraca Lahan, Hutan, Air, dan Mineral. Dalam penyusunan SNI Neraca Sumberdaya Lahan, BIG bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN, SNI Neraca Sumberdaya Hutan dengan Kementerian KLHK, SNI Neraca Sumberdaya Air dengan Kementerian PU, dan SNI Neraca Sumberdaya Mineral dengan Kementerian ESDM.

Seiring dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mementingkan aspek ekonomi tetapi harus didukung dengan nilai sumberdaya alam yang harus tetap lestari, maka penghitungan Neraca Sumberdaya Alam memegang peranan penting dalam mengukur cadangan ekonomi SDA. Sejak tahun 1993 United Nations Statistics Division (UNSD) mengenalkan National Accounting: Integrated Environmental dan Economic Accounting. Neraca ini menggabungkan aspek lingkungan dan ekonomi dalam perhitungan neraca. Perhitungan ini menjadi sangat penting mengingat penyumbang PDB terbesar dari sektor pertambangan. Sektor pertambangan berpotensi tinggi memacu perubahan

penutup lahan. Selain sektor pertambangan, sektor perkebunan terutama perkebunan sawit juga memacu pembukaan hutan dan perubahan penutup lahan.

Lembaga yang bertanggung jawab dalam integrasi ini adalah BPS sesuai dengan PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. BPS sejak tahun 1990 sudah melaksanakan penyusunan Sistem Neraca Lingkungan (SISNERLING) berdasarkan metode System of Environmental Economic Accounting (SEEA). BPS menurunkan SEEA menjadi 4 neraca yaitu neraca arus fisik, neraca fungsional untuk transaksi lingkungan, neraca aset dalam satuan fisik dan moneter serta neraca ekosistem. Neraca arus fisik meliputi aliran input alam dari lingkungan ke dalam perekonomian, aliran produk di dalam perekonomian dan aliran sisaan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi. Neraca fungsional digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut lingkungan. Neraca aset menyajikan informasi mengenai ketersediaan sumberdaya alam untuk digunakan sebagai penilaian aspek keberlanjutan. Neraca ekosistem menyajikan informasi mengenai ekosistem. Peranan BIG dalam mendukung neraca di atas sangat signifikan. BIG bertugas menyajikan neraca dalam bentuk spasial. Selain itu berperan dalam melakukan pembinaan neraca sumberdaya alam berbentuk pembinaan teknis dan persiapan petunjuk teknis, modul, perka dan standar lainnya terkait norma standar pedoman dan kriteria dalam penyusunan pemetaan NSDA.

Masalah yang dihadapi sekarang adalah belum adanya standar data dan klasifikasi yang sesuai

antara SNI yang sudah ada dengan metode SEEA. Untuk itu tahun 2020 BIG akan menyusun NSPK atau Perka BIG tentang penyusunan Pemetaan Neraca Sumberdaya dengan mengkomodir metode dari SNI dan SEEA. Dalam penyusunan NSPK atau Perka BIG ini, BIG akan melakukan koordinasi dengan BPS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal ini diperlukan agar tidak ada lagi perbedaan dalam penyusunan neraca sumberdaya alam. Pada akhirnya hasil dari NSDA dapat digunakan untuk menghitung kekayaan negara dalam bentuk nilai ekonomi (valuasi ekonomi). [Diah Retno Minarni, 2019]



REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |

| Editor: Mulyanto Darmawan, Fakhruddin Mustofa, Sri Eka Wati, Randhi Atiq, Chintia Dewi |

| Desain Tata Letak: Gin Gin Gustiar |

Rapat Pleno Masal Peta Rencana Tata Ruang



Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) pada tanggal 16-18 Desember 2019 melaksanakan kembali Rapat Pleno Masal Pemberian Rekomendasi Persetujuan Peta Rencana Tata Ruang baik untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 hari penuh untuk menindaklanjuti beberapa hasil kegiatan Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang (RTR) Terekomendasi Paket 1 dan Paket 2 tahun 2019. Kegiatan Penyusunan Peta RTR Terekomendasi dan rapat pleno ini dalam rangka percepatan penyelesaian peta rencana tata ruang.

Rapat pleno merupakan rangkaian akhir dari proses asistensi dan supervisi Peta RTR yang berarti pemerintah daerah telah menyelesaikan tahapan pelaksanaan asistensi dan supervisi, sehingga diusulkan untuk pemberian persetujuan petanya. Pada rapat pleno dilakukan proses uji petik peta untuk melihat kesesuaian Peta RTR yang dihasilkan dengan standar penyusunannya. Aspek uji petik dalam rapat pleno mencakup geometris, kelengkapan

tematik dan perencanaan serta kartografis Peta RTR.

Rapat pleno dilakukan secara bersamaan untuk 28 Kabupaten/Kota yang dibagi menjadi 3 hari. Pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 Rapat Pleno dihadiri oleh 10 Kabupaten/Kota dengan 6 peta RTRW dan 5 peta RDTR. Peta RTR yang dibahas dalam pleno ini adalah RTRW Kab. Subang, Kab. Cianjur, Kab. Minahasa Utara, Kab. Gianyar, Kab. Merauke, dan RTRW Kab. Kepulauan Sula. Untuk RDTR dibahas tentang RDTR BWP Mamuju (Kab. Mamuju), RDTR BWP Moncongloe (Kab. Maros), RDTR BWP Simpang Rimba (Kab. Bangka Selatan), RDTR BWP Nabire (Kab. Nabire) dan RDTR BWP Tegalalang (Kab. Gianyar). Kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Rapat Pleno dihadiri oleh 8 Kabupaten/Kota dengan 5 peta RTRW dan 9 peta RDTR. Peta RTR yang dibahas dalam pleno ini adalah RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur, RTRW Kab. Luwu Utara, RTRW Kab. Solok, RTRW Kab. Minahasa Selatan, RTRW Kab. Kolaka Utara. Untuk RDTR dibahas RDTR BWP Balikpapan Utara, RDTR BWP Balikpapan Barat, RDTR BWP Balikpapan Kota, RDTR BWP Balikpapan Selatan, RDTR BWP Balikpapan Tengah, RDTR BWP Balikpapan Timur, RDTR BWP Kadungora, RDTR BWP Leles (Kab. Garut), dan RDTR BWP Pahauman (Kab. Landak). Kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Rapat Pleno dihadiri oleh sepuluh (10) Kabupaten/Kota dengan lima (5) peta RTRW dan sembilan (6) peta RDTR. Peta RTR yang dibahas dalam pleno ini adalah RTRW Kab. Sumbawa, RTRW Kab. Tanah Datar, RTRW Kab. Way Kanan, RTRW Kab. Bojonegoro, RTRW Kab. Sukabumi,

RDTR BWP Gerokgak (Kab. Buleleng), RDTR BWP Lamongan (Kab. Lamongan), RDTR BWP Pelaihari (Kab. Tanah Laut), RDTR BWP Cibinong (Kab. Bogor), RDTR BWP Modayag – Modayag Barat (Kab. Bolaangmangondow Timur) dan RDTR BWP Tutuyan - Kotabunan (Kab. Bolaangmangondow Timur).



Pelaksanaan pleno menghadirkan tim penguji dari luar Pusat PTRR yaitu peneliti utama dari Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama – BIG dan Akademisi, antara lain Prof. Fahmi Amhar, Dr. Priyadi Kardono, Ir. Yatin Suwarno, M.Sc, Dr. Bambang Riadi, Nugroho, Purwono, S.Si, Mochamad Irwan Hariyono, S.T, Fahrul Hidayat, ST, dan Danang Budi Susetyo, ST. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc), dalam arahnya mengharapkan agar Peta RTRW yang disusun oleh pemerintah daerah dapat menyiapkan perencanaan pemanfaatan ruang yang lebih baik dengan memperhatikan aspek kualitas lingkungan hidup, sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat dan dapat menarik investasi ke wilayahnya. [Izzuddin Abdul Aziz, 2019].

Potret

Kegiatan

Meningkatkan Kecerdasan Spasial dan Kompetensi Teknis Pemetaan mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi FKIP, UMS



Tepat pada tanggal 26 November 2019, Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial kembali menyelenggarakan Workshop Geoliterasi untuk Negeri. Acara ilmiah ini dilaksanakan di Ruang Seminar Lt 7, Gedung Siti Walidah, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) bertema "Geoliterasi Untuk Meningkatkan Kecerdasan Spasial dan Kompetensi Teknis Pemetaan". Tema ini sangat relevan untuk Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), mengingat informasi geospasial harus sampai kepada generasi muda, terutama untuk calon-calon pendidik bidang kebumihutan. Peserta yang hadir cukup membludak sebanyak 140 mahasiswa, dan ditambah beberapa dosen Pendidikan Geografi FKIP dan Fakultas Geografi UMS.

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi merupakan calon guru geografi sehingga perlu mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan metode dan teknologi pemetaan yang dapat menunjang tugasnya saat ini sebagai mahasiswa geografi maupun setelah lulus nanti menjadi guru dan pendidik. Guru Geografi sebagai penyambung informasi geospasial kepada anak-anak

milennial yang perlu diberikan pemahaman atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tangan merekalah ujung tombak penyampaian informasi tentang wilayah NKRI secara benar. Oleh karena itu perlu ditanamkan dari sekarang pemahaman dan pengetahuan akan wilayah NKRI. Disinilah pentingnya peran guru geografi karena berkontribusi dalam menentukan kehidupan bangsa kedepan.

Geoliterasi menghadirkan narasumber Drs. T. Bachtiar, SE seorang penggiat geoliterasi, penulis buku Geoliterasi, dan penggiat ilmu geografi yang mampu menginspirasi mahasiswa untuk peduli pada lingkungan sekitar. BIG juga menghadirkan narasumber internal dari Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang memberikan materi yang tak kalah menarik terkait Proses Pembuatan Peta Tematik oleh Amanah Anggun Prabandari, Aplikasi dan Pemanfaatan Peta Tematik oleh Satrio Jati Kinantyo Widhi, dan Peran Peta dan Atlas untuk Pendidikan oleh Fakhruddin Mustofa. Mereka banyak bertanya dan antusias mengikuti Workshop Geoliterasi serta berharap adanya kesempatan workshop lanjutan pada waktu yang akan datang. [Niendyawati, 2019].

Partisipasi BIG dalam Munas DWP ke-IV



Dharma Wanita Persatuan (DWP) BIG turut berpartisipasi di dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-IV DWP yang diselenggarakan tanggal 11-12 Desember 2019 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Perwakilan DWP BIG yang hadir antara lain Ketua DWP BIG Yanti Hasanuddin, Wakil Ketua Nuring Antonius Bambang Wijanarto, Sekretaris Yani Heru Warsito, Bidang Pendidikan Lila Ade Komara, Bidang Ekonomi Iis Suprajaka, Bidang Sosial Budaya Erni Farid. Pelaksanaan Munas kali ini mengangkat tema "Optimalisasi Kinerja DWP sebagai Mitra Strategis Pemerintah untuk Suksesnya Pembangunan Nasional". Selain sebagai momentum bersilaturahmi dan menampung aspirasi, Munas kali ini bertujuan untuk menyosialisasikan beberapa perubahan pada anggaran dan pola pengurusan DWP.

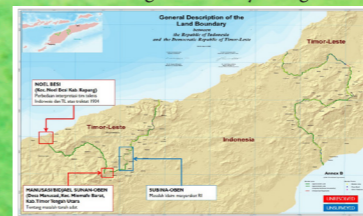
Sekretaris Kemenpan RB dalam sambutan Munas memaparkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, DWP harus diperkuat

agar memiliki peran dalam upaya menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Sebagai wadah istri Aparatur Sipil Negara, DWP diproyeksikan sebagai organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas para suami untuk meningkatkan kinerja. Lebih dari itu, mereka juga sering melaksanakan aksi sosial dengan menyambangi kelompok masyarakat yang kadang dipandang sebelah mata.

Pembicara kunci Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menyampaikan hal-hal yang menjadi harapan pemerintah terhadap DWP. Salah satunya adalah mendukung visi misi presiden untuk memberdayakan wanita sebagai pionir dalam membangun generasi muda. Beberapa prioritas yang perlu dibantu dukungan DWP antara lain pemberdayaan perempuan di bidang wirausaha, meningkatkan peran ibu dalam pendidikan anak-anak, menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan angka pekerja anak, dan menurunkan angka perkawinan anak. Menteri PPPA juga mengapresiasi DWP yang telah mendukung wanita untuk melakukan kontribusi baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Menurutnya, wanita kini bisa lebih leluasa berkiper dan memberikan sumbangsih bagi masyarakat secara langsung. [Wahyu Tri Handayani, 2019].

NSDA sebagai alternatif solusi Penyelesaian Unsurveyed Segment RI-RDTL

Segmen Subina - Oben Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) adalah salah satu pekerjaan rumah Tim Penyelesaian Perbatasan Negara Darat RI-RDTL yang sampai saat ini belum mendapatkan solusi terbaik. Permasalahan ini muncul ketika survei deliniasi bersama RI-RDTL dilaksanakan pada Juli - Juni 2003, terdapat beberapa klaim dari masyarakat Indonesia terkait lahan yang sebelumnya sudah dikuasai secara fisik turun-temurun. Deliniasi bersama RI-RDTL sendiri dilaksanakan dengan kesepakatan bahwa penyelesaian Perbatasan Negara Darat RI-RDTL berdasar pada 2 (dua) dokumen utama yaitu Convention 1904 dan Arbitral Award 1914 antara Belanda dan Portugis. Setelah melewati beberapa kali sosialisasi kepada pemerintah dan masyarakat perbatasan belum menemukan titik temu, akhirnya pada 23-24 Desember 2005 dalam Pertemuan Technical Sub-Committee Border Demarcation and Regulations (TSC-BDR) RI-RDTL disepakati bahwa segmen Subina - Oben disebut sebagai Unsurveyed segments.



Disepakatinya istilah Unsurveyed segment berdasar pada pemahaman bahwa segmen Subina-Oben sudah disepakati di level tim Teknis kedua negara namun terkendala ketika dilaksanakan survei deliniasi bersama.

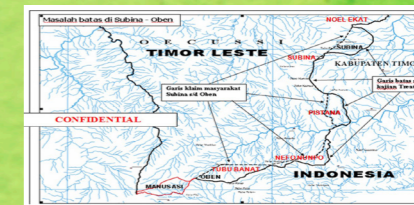
Beberapa upaya dilaksanakan kedua negara untuk menemukan solusi penyelesaian permasalahan ini diantaranya :

1. Kesepakatan dalam TSC-BDR 13 - 14 Februari 2004 di Denpasar untuk dilaksanakan Joint Assesment di wilayah bermasalah
2. Pada pelaksanaannya Kegiatan Joint Assesment/Survei Pertanian

dilaksanakan secara unilateral dengan RDTL pada 1 - 16 Juni 2008 sedangkan RI pada 27 Oktober - 06 November 2008.

3. Hasil survei kedua negara dilaporkan TSC-BDR 27 - 29 Mei 2009 di Dili namun tidak menemukan titik temu

Secara spesifik pembahasan unsurveyed segment berhenti pada tahun 2009 karena sampai dengan saat pemerintah kedua negara sepekat untuk menyelesaikan segmen bermasalah lainnya yaitu unresolved segments.



Salah satu alternatif solusi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah RI dalam menyelesaikan masalah ini adalah melakukan relokasi lahan garapan masyarakat kedalam wilayah lain di dalam RI. Kemanakah relokasinya? Seberapa luas wilayah produktif di TTU? Bagaimana prospek kedepan? Salah satu solusinya adalah bisa dijawab dengan menyusun Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) Hutan dan Lahan di wilayah tersebut.

Sebagai dasar penyusunan tersedia Citra Satelit Ikonos 2001, Citra Quickbird 2010 dari Pemerintah RDTL, CTSRT 2014, dan jika dibutuhkan yang lebih detail ada Peta Foto menggunakan wahana UAV skala 1 : 1.000 yang secara khusus mengakuisisi wilayah tersebut pada tahun 2015. Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) melalui bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya (PDS) memiliki kompetensi khusus dalam menyusun NSDA serta mengintegrasikannya, sehingga data dan informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan untuk dapat menjadi salah satu masukan dalam menyelesaikan unsurveyed segment RI-RDTL. [M. Nurman, 2019]

Dukungan PPTRA untuk SDGs Center Unila dan Perpustakaan Lampung



Setidaknya ada dua institusi penjaga literasi di tengah gempuran informasi yang tersebut yaitu institusi pendidikan dan bagian perpustakaan. Keduanya merupakan penggerak wacana berpikir kritis ditopang oleh ilmu pengetahuan sehingga output yang dihasilkan jauh dari 'sampah' informasi. PPTRA berusaha selalu memberikan dukungan kepada dua institusi tersebut sesuai dengan kapasitas dan tugas fungsinya dalam penyelenggaraan pemetaan tata ruang, dinamika sumberdaya, dan atlas. Salah satunya adalah dukungan Tim Surveyor Pemetaan PPTRA ketika melakukan validasi data penyusunan Atlas Sustainable Development Goals (SDGs) ke SDGs Center Universitas Lampung (Unila), Perpustakaan Daerah (Perpusda) Provinsi Lampung, dan titik-titik pengamatan lapangan terkait 17 tujuan SDGs.

PPTRA mendukung berdirinya SDGs Center Unila sebagai salah satu basis kemitraan sukseskan program SDGs di Lampung. Bentuk dukungannya yaitu memberikan Peta Provinsi Lampung,

Peta NKRI, dan penyampaian umum penggunaan informasi geospasial (IG) dasar dan tematik untuk mendukung program kerja SDGs Center Unila. Tim PPTRA diterima langsung oleh Dr. Unang Mul Khan, salah satu motor penggerak SDGs Center Unila. Beliau berharap semakin banyak kemitraan yang dijalin maka akan mempermudah semua pihak sukseskan program SDGs hingga 2030. Lebih lanjut, Unang mengatakan bahwa potensi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera merupakan modal besar untuk mengurangi angka kemiskinan di Lampung, sesuai dengan Tujuan 1 SDGs yaitu Tanpa Kemiskinan.



Selepas dari Unila, tim bergerak menuju ke Perpustakaan Lampung dan diterima dengan tangan terbuka Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Lampung, Siti Fajariyah SH. Beliau berharap, dukungan berupa buku Atlas, Peta Lampung, dan Peta NKRI menjadi gerbang literasi kewilayahan terutama bagi pembaca yang tiap hari datang. Khusus untuk Atlas Junior akan ditempatkan di Taman Baca Anak di salah satu sudut strategis Perpustakaan Lampung. Medio 2020 nanti, Perpustakaan Lampung akan menempati gedung modern nan megah sebagai bukti keseriusan Pemprov Lampung dalam menggalakkan literasi untuk generasi Lampung. [Fakhruddin Mustofa, 2019].

Manajemen Penanggulangan Bencana

RESENSI
Buku

Penulis menyampaikan konsep yang menarik pada bagian awal bukunya yaitu, "bencana muncul bila ancaman bahaya bertemu dengan ketidakberdayaan". Ketidakberdayaan manusia akan tetap ada manakala manajemen kesiapsiagaan dan keadaan darurat masih

belum baik. Sehingga suatu daerah yang memiliki tingkat bahaya tinggi (hazard) serta memiliki kerentanan/kerawanan (vulnerability) yang juga tinggi tidak akan memberi dampak yang hebat/luas jika manusia yang berada di sana memiliki ketahanan terhadap bencana (disaster resilience). Buku ini sangat menarik karena mengajak pembaca memahami pengertian mengenai bencana, jenis-jenisnya, siklusnya, upaya-upaya penanggulangannya, dan pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai analisis risiko bencana serta rapid health assessment (RHA) dan perencanaan penanggulangan bencana.

Pembaca juga diajak memahami beberapa sistem manajemen terkait penanggulangan kebencanaan, diantaranya manajemen korban massal; manajemen sarana permukiman/pengungsian dan logistik; manajemen kesehatan dasar, air bersih, dan sanitasi dalam kedaruratan bencana; manajemen pengendalian penyakit menular dan surveillance data penyakit wilayah darurat bencana; serta manajemen sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan. Kemudian pada bagian akhir, disampaikan pembahasan terkait pertolongan pertama pada gawat darurat dan komunikasi risiko dalam penanggulangan krisis kesehatan. Buku ini layak menjadi salah satu pedoman bagi pengambil kebijakan terutama sektor kebencanaan. [Rochmad Budi Santoso, 2019]

Manajemen
Penanggulangan
Bencana

Judul Buku : Manajemen Penanggulangan Bencana
Penulis : Dr. I. Khambali, S.T., MPPM.
Penerbit : Penerbit Andi

Kita telah berada di akhir bulan tahun 2019. Redaksi merasa harus berterimakasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam newsletter, "Anda" salah satunya
-Terima Kasih-